

TINJAUAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Edisah Putra Nainggolan ¹⁾, Dewi Sholeha ²⁾, Syahvira Indriyani ³⁾
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,
Indonesia ^{1,3)}

Fakultas Teknik Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ²⁾

Corresponding Author :

edisahputra@umsu.ac.id ¹⁾, alkhansadewi@gmail.com ²⁾

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi dampak Tugas Pokok dan Fungsi serta Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wilayah Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini, teknik asosiatif diadopsi. Populasi penelitian adalah enam desa di Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Sampel jenuh yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 42 orang partisipan yang berasal dari desa-desa di Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini, metode kuesioner dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data penelitian ini adalah kuantitatif dan menggunakan analisis statistik, meliputi pengujian hipotesis, analisis model Auter, dan analisis inner model. Pengolahan data untuk penelitian ini.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Tugas Pokok dan Fungsi, Akuntabilitas

Abstract

The purpose of this study is to investigate and evaluate the impact of Main Duties and Functions and the Accounting Information System on the Accountability of Village Financial Management in the Villages of Sawit Seberang District Area, Langkat Regency. In this study, an associative technique was adopted. The six villages in the Sawit Seberang District of the Langkat Regency comprised the study's population. 42 participants from villages in the Sawit Seberang District of Langkat Regency made up the saturated sampling sample used in this study. In this study, questionnaires and observational methods were employed as data-gathering methods. This study's data analysis method is quantitative and employs statistical analysis, including hypothesis testing, Auter model analysis, and inner model analysis. Processing data for this study.

Keywords: Accounting Information Systems, Main Duties and Functions, Accountability

PENDAHULUAN

Implementasi akuntabilitas public merupakan proses yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah yang bebas dari tekanan pihak yang berkepentingan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik. Pertanggungjawaban

History:

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 25 Desember 2023

Published: 26 Desember 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Edisah Putra Nainggolan ¹⁾, Dewi Sholeha ²⁾, et al., **Tinjauan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Tugas Pokok Dan Fungsi**

secara berkala melalui salurannya mencakup kinerja keuangan pemerintah harus disampaikan secara konsisten. Penerapan akuntabilitas juga menjadi Kewajiban pemerintah daerah termasuk pemerintah desa, (Setiawan et al., 2017).

Dalam penerapannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mencakup pertanggungjawaban kepada Masyarakat dalam menjunjung tata kelola pemerintahan yang baik, mencakup pengelolaan dan kemampuan efektivitas dalam pembelanjaan dana desa, (Sinambela, 2021). Dalam proses peningkatan akuntabilitas didukung suatu sistem yang terintegrasi, dimana informasi harus tepat waktu, lengkap, andal dan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan (Nainggolan, 2015). Sistem di sini adalah sistem yang akan memberikan informasi berupa perhitungan akuntansi yang tepat. Sistem informasi akuntansi adalah elemen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan dengan pengambilan keputusan (Ratnasari, 2019).

Dalam upaya menunjang operasional sehari-hari, mendukung pengambilan keputusan dan memenuhi kewajiban terkait tanggung jawab keuangan desa dibutuhkan suatu system informasi, (Sari Et Al., 2020). Laporan Keuangan memiliki tujuan dalam menyediakan Informasi yang Menyangkut Posisi keuangan, Kinerja, Serta Perubahan Posisi Suatu Organisasi/Lembagayang Bermanfaat Dalam Pengambilan Keputusan(Hanum, 2019).

Pemahaman terhadap tupoksi suatu organisasi juga dapat mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan keuangan desa, karena merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana masyarakat dan upaya untuk menjamin sumber daya tersebut tersedia. secara ekonomi dan efektif. Masyarakat atau masyarakat selalu menginginkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan transparan, dan persyaratan ini berlaku untuk semua tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah tingkat desa. (Lumempow et al., 2021).

Untuk melaksanakan tugas pemerintahan desa diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang lengkap, termasuk struktur organisasi yang terdiri atas perangkat pemerintah desa dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing (tupoksi). Tujuan perbaikan struktur organisasi adalah agar desa dapat secara efektif menjalankan perannya sebagai organisasi pemerintahan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa, (Hulu & Zagoto, 2022).

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Diwilayah Kecamatan Sawit Seberang

Lulusan	Jumlah
SMA	27
Diploma	4
S1 Ekonomi	1

S1 Lulusan Lain	10
S2	-

Sumber : Data Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Sawit Seberang

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi penyusunan laporan keuangan karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin banyak ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi yang dapat membantu karyawan selama bekerja. (Maghfiroh et al., 2022).

Adapun berita dugaan penyalahgunaan dana desa , Norman Ginting SE, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemberantasan Korupsi (Waketum DPN LPK), menyatakan bahwa mereka menunggu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk berani menyelidiki kasus dugaan korupsi Bimtek Dana Desa yang ada di Kabupaten Langkat. Ia berpendapat bahwa program Bimtek Dana Desa tidak menguntungkan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2022 ini, sejumlah program Bimtek akan dilaksanakan. Di antaranya, setiap bendahara desa Langkat mengikuti kegiatan Bimtek di hotel grand Antares Medan, Sumatera Utara, pada awal Agustus 2022. Mereka menghabiskan anggaran 5 juta rupiah per orang (bendahara desa), yang diperoleh dari APBD Langkat, Bimtek yang berlangsung selama 3 hari itu dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Potensi Indonesia (Pusakapi) tersebut menelan anggaran yang bersumber dari DD sebesar 15 juta per desa. Sebanyak 167 desa yang mengikuti kegiatan bimtek tersebut, dengan biaya keseluruhan lebih kurang sebesar 2.5 miliar (www.portibi.id).

Permendagri No 20 Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan dasar desa agar dapat mengelola secara otonomi wilayahnya dan bukan hanya bersifat normatif. Peraturan tersebut, menjadikan desa dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya, Desa seharusnya lebih transparan dengan menteri tersebut, tetapi Saat ini, perangkat desa masih belum memahami sepenuhnya resmi dan tidak dapat diakses sehingga masyarakat tidak dapat mengakses pengelolaan keuangan desa (Pratiwi & Nursiam, 2019).

A. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanggungjawaban atau menyikapi suatu kinerja dan tindakan seseorang pimpinan atau dalam suatu organisasi akuntabilitas merupakan bentuk dari Akuntabilitas (Amaliya & Maryono, 2020). Penilaian baik akan kualitas suatu pekerjaan menjadi penialain setiap orang, jika dilaksanakan secara berkualitas (Nainggolan & Abdullah, 2016). Pengelolaan keuangan desa adalah keterlibatan aktif dari masyarakat dan pihak lain yang menggunakan informasi. Prinsip-prinsip dalam tata Kelola keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta pengelolaan anggaran yang tertib dan disiplin, harus ditegakkan secara konsisten oleh semua elemen terkait dalam pengelolaan keuangan desa (Afriansyah et al., 2022). Menurut

(Nela Sari & Wahidahwati, 2019) indikator mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain:Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, pertanggungjawaban.

B. Sistem Informasi Akuntansi

Perancangan dalam proses pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemrosesan Informasi keuangan sebagai alat bantu pengambilan keputusan disebut sebagai Suatu system Informasi (Romney & Steinbart, 2018), (Fadil, 2002) menyatakan adapun indikator sistem informasi Akuntansi adalah sebagai berikut :Perencanaan, keputusan, ketelitian, pertanggungjawaban keuangan. Seluruh transaksi keuangan akan tercatat dalam SIA sehingga pengelolaan data Dapat dilakukan secara optimal. SIA yang handal akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik dan Dapat dijadikan alat pengambilan keputusan yang tepat.

C. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Tupoksi menjadi salah satu indicator dalam penegakan akuntabilitas, tupoksi merupakan rincian tugas utama yang harus dijalankan dalam suatu organisasi sebagai bagian dari penegakan akuntabilitas. Setiap divisi dalam organisasi pemerintahan tentunya telah dibekali dengan tupoksi masing-masing. (Asmoro & Resmiatini, 2020). Indikator variabel pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam penelitian ini (Saleh, 2019) : Tingkat pemahaman terhadap tugas pokok dari setiap jabatan, Tingkat pemahaman terhadap fungsi dari setiap jabatan.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan pendekatan asosiatif penelitian ini dilakukan dan dikembangkan secara teoritis (Sugiyono, 2019). populasi pada penelitian ini perangkat Desa Kecamatan Sawit Seberang mewakili daerah di Kabupaten Langkat Kecamatan Sawit Seberang memiliki 6 Desa. Teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yakni 42 perangkat Desa Se-Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Analisis data menggunakan *partial least square – structural equation model* (PLS-SEM)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Validitas Konvergen

Untuk melihat apakah suatu indicator variabel valid, maka nilai outer loading diatas 0,7. Maka indikator tersebut valid (Hair Jr et al., 2017).

Tabel 2. Validitas Konvergen

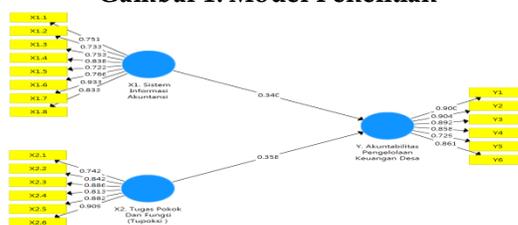
	SIA	Tupoksi	Akuntabilitas

Edisah Putra Nainggolan ¹⁾, Dewi Sholeha ²⁾, et al., **Tinjauan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Tugas Pokok Dan Fungsi**

PX1.1	0.751		
PX1.2	0.733		
PX1.3	0.753		
PX1.4	0.838		
PX1.5	0.722		
PX1.6	0.766		
PX1.7	0.933		
PX1.8	0.833		
PX2.1		0.742	
PX2.2		0.842	
PX2.3		0.886	
PX2.4		0.813	
PX2.5		0.882	
PX2.6		0.909	
PY1			0.900
PY2			0.904
PY3			0.892
PY4			0.858
PY5			0.729
Y6			0.861

Sumber : SEM PLS (2023)

Gambar 1. Model Penelitian



B. Pengujian Validitas Konvergen

1. *Outer loading* pada variabel SIA > 0,7 maka seluruh indikator variabel Sistem Informasi Akuntansi valid.
2. *Outer loading* pada variabel Tupoksi > 0,7 maka seluruh indikator variabel Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) dinyatakan valid

3. *Outer loading* pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa $> 0,7$ maka seluruh indikator variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan valid.

C. Analisis Konsistensi Internal

Tabel 3. Penguian Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	(AVE)
Sistem Informasi Akuntansi	0.926	0.969	0.931	0.630
Tupoksi	0.922	0.958	0.938	0.718
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0.928	0.935	0.944	0.739

1. Nilai Reliabilitas Komposit Sistem Informasi Akuntansi Sebesar $0,931 > 0,700$ Maka Variabel Sistem Informasi Akuntansi Adalah Reliabel
2. Nilai Reliabilitas Komposit Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Memiliki Sebesar $0,938 > 0,700$ Maka Variabel Sistem Informasi Akuntansi Adalah Reliabel
3. Nilai Reliabilitas Komposit Akuntabilitas Memiliki Sebesar $0,944 > 0,700$ Maka Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Adalah Reliabel

D. Kolinearitas (*Colinierity /Variance Inflaction Factor/VIF*)

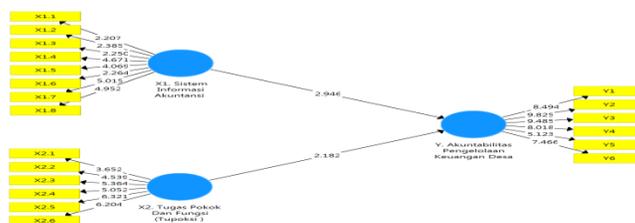
Tabel 4. Nilai VIF

	SIA	Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi)	Akuntabilitas
Sistem Informasi Akuntansi			1.053
Tupoksi			1.053
Akuntabilitas			

1. VIF variable korelasi Sistem Informasi Akuntansi dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa adalah $1,053 < 5,00$ (kolinearitas baik)
2. VIF variable korelasi Tupoksi dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa adalah $1,053 < 5,00$ (kolinearitas baik)

E. Pengujian Hipotesis

Gambar 2. Uji Hipotesis



Tabel 5. Pengujian pengaruh langsung

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
Sistem Informasi Akuntansi -> Akuntabilitas	0.340	0.391	0.115	2.946	0.003
Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) -> Akuntabilitas	0.358	0.350	0.164	2.182	0.030

1. Koefisien jalur Variabel SIA terhadap Akuntabilitas bernilai 0.340 (positif), *P-Values* bernilai 0,003 maka $0,003 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa SIA berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas
2. Koefisien jalur Pengaruh langsung Tupoksi terhadap Akuntabilitas bernilai 0.358 (positif), *P-Values* bernilai 0,030 maka $0,030 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa Tupoksi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas

F. Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 6. R Square

	R Square	Adjusted R Square
Akuntabilitas	0.298	0.262

Tabel diatas menunjukkan hasil pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Tugas Pokok Dan Fungsi terhadap Akuntabilitas adalah sebesar 0,298 artinya besaran pengaruh 29,%, menunjukkan PLS yang bernilai sedang.

G. F-Square

Tabel 7. F Square

	SIA	Tupoksi	Akuntabilitas
SIA			0.156
Tupoksi			0.173
Akuntabilitas			

F-Square dapat dilihat sebagai berikut: Variabel Akuntabilitas memiliki nilai $F^2=0,156$, dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai $F^2=0,173$ maka terdapat efek kecil dari variabel eksogen terhadap endogen

H. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

SIA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas. Dengan penerapan SIA warga desa akan mampu memantau secara langsung pengelolaan keuangan desa akses yang diperoleh oleh pihak terkait akan penerapan SIA mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan SIA akan Dapat menekan terjadinya kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan serta proses audit akan lebih mudah dilakukan. (Ratih, 2012) menyatakan dengan SIA maka tugas dan tanggungjawab akan semakin jelas sehingga terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan Desa khususnya dalam pencatatan, dan pelaporan keuangan Desa.

I. Pengaruh Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Tupoksi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, dengan tupoksi setiap bagian dalam struktur desa akan memahami tugas dan tanggungjawabnya. Dengan tupoksi maka setiap pekerjaan Dapat terdefinisikan secara jelas, sehingga Dapat dengan mudah untuk dilaksanakan, sehingga pengelolaan keuangan desa Dapat lebih terjamin akuntabilitasnya (Asmoro & Resmiatini, 2020). Penelitian (Wibowo, 2019) dengan tupoksi tanggungjawab setiap bagian dalam pengelolaan keuangan desa akan semakin jelas, hal ini akan meminimalisir adanya penyalahgunaan ataupun kelalaian dalam pengelolaannya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh signifikan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Di Wilayah Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
2. Adanya pengaruh signifikan Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Di Wilayah Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat.

Saran

Dari kesimpulan maka penulis menyampaikan saran :

1. Pada Desa Di Wilayah Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat agar lebih memperhatikan Sistem Informasi Akuntansi yang ada di Pada Desa Di Wilayah Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat.

2. Pada Desa Di Wilayah Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat agar lebih memperhatikan Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) sehingga aparatur desa bekerja lebih baik.
3. Pada Desa Di Wilayah Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat agar terus meningkatkan Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) sehingga Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa semakin baik

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68.
- Amaliya, R., & Maryono. (2020). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Komputersasi Akuntansi*, 13(1), 122–133.
- Asmoro, B. T., & Resmiatini, E. (2020). Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa – Bramantyo TA, Erna R. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 4(2), 85–99.
- Fadil, M. (2002). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internet Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. BP UNDIP.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced Issues In Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Hanum, Z. (2019). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Pantai Labu Pekan Kabupaten Deli Serdang. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(3), 237–242.
- Hulu, F., & Zagoto, H. (2022). Analisis Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa Idala Jaya Kecamatan Maniamolo. *Civic Society Research and Education ...*, 3(2).
- Lubis, H. Z. (2013). Pengaruh Sistem Informasi Berbasis Komputer dan Kepercayaan Terhadap Kinerja Individual. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 252–260.
- Lumempow, V., Posumah, J. H., & Kolondam, H. F. (2021). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi. *Jap*, VII(103), 38–49.
- Maghfiroh, L., Askandar, N. S., & Junaidi. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Purwosari. *E-Jra*, 11(09), 84–92.
- Nainggolan, E. P. (2015). Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Tingkat Desentralisasi Sebagai

- Variabel Moderating. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 1–11.
- Nainggolan, E. P., & Abdullah, I. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas, Objektivitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Study Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan*.
- Nela Sari, A., & Wahidahwati. (2019). Pengaruh penggunaan ADD, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–19.
- Pratiwi, S. P., & Nursiam, M. H. (2019). *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Petanggungjawaban APB Desa (Studi kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)*. 20.
- Ratih, A. E. (2012). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau*. Universitas Sumatera Utara.
- Ratnasari, S. L. (2019). *HUMAN CAPITAL (Manajemen Sumber Daya Manusia)*. Penerbit Qiara Media.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems (edisi ke-14). In England: Pearson Education Limited*.
- Saleh, K. (2019). Analisis Pengaruh Pemahaman Tugas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 4(2), 129–138.
- Sari, E. N., Muhyarsyah, M., & Wahyuni, N. S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 166–197.
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., SE, A., Sulindawati, N. L. G. E., & SE Ak, M. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1), 1–11.
- Sinambela, E. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 31–41.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wibowo, K. (2019). *Pengaruh Bimbingan Teknis, Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi), Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Wilayah Kabupaten Bantul*. UPN" Veteran" Yogyakarta.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.